KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Hunian tetap bagi korban bencana, rekonstruksi sebaiknya diikuti rehabilitasi kawasan
Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Hunian Tetap Bagi Korban Bencana

Rekonstruksi Sebaiknya Diikuti Rehabilitasi Kawasan

Senayan menyambut baik rencana Pemerintah membangun 2 ribu unit rumah atau hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut). Masyarakat terdampak bencana mesti segera kembali hidup layak dan aman.


FOTO: IG PRIBADI

Sudjatmiko

ANGGOTA Komisi V DPR Sudjatmiko mengatakan, kebijakan Pemerintah ini akan meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

"Pemerintah Daerah (Pemda) perlu aktif mempercepat proses ketersediaan lahan," ucap Sudjatmiko dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Pemerintah akan membangun 2.000 unit rumah untuk korban bencana di wilayah Sumatera. Proyek itu akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari hasil efesiensi anggaran.

"Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan bisa langsung saja jadi rumah tetap," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Pemda, lanjut Sudjatmiko, harus bergerak cepat menyiapkan lahan yang tepat untuk pembangunan rumah bagi korban bencana. Penentuan lokasi sangat krusial agar proses pembangunan bisa segera dilakukan tanpa hambatan yang berarti.

Menurutnya, lokasi hunian tetap harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Seperti aspek keamanan dari potensi bencana lanjutan, aksesibilitas dan kedekatan dengan sumber mata pencaharian warga.

Idealnya, kata dia, lahan yang digunakan tidak jauh dari rumah dan lingkungan asal masyarakat tinggal sebelumnya. Tujuannya, agar mereka tidak tercerabut dari lingkungan sosial, aktivitas ekonomi, dan akses pendidikan maupun layanan dasar lainnya.

Sudjatmiko berharap, koordinasi antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemda dapat berjalan optimal. Sehingga, program pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera dapat terlaksana tepat waktu dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kami (Komisi V DPR) akan terus mengawal program tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi para korban bencana," tegas politikus PKB ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta Pemerintah mulai mendata korban bencana yang layak menerima hunian tetap. Karena tahap rekonstruksi ini telah didahului dengan proses pendataan detail tentang korban bencana. Termasuk siapa saja yang menerima hunian permanen dari Pemerintah.

"Perlu ada kualifikasi yang harus dipenuhi para penerima hunian permanen. Misal, rumah sebelumnya sudah tidak bisa ditempati lagi karena rusak total terdampak bencana," usul Huda dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Huda melihat beberapa wilayah di Aceh Tamiang lumpurnya sampai menutupi atap rumah. Atau korban yang tinggal di wilayah yang rawan longsor.

"Jadi kualifikasi ini harus diperjelas sejak awal, sehingga tidak memicu persoalan di kemudian hari," saran dia.

Huda berharap, pemberian hunian bagi korban bencana dan pembangunan kembali fasilitas layanan dasar seperti jalan, sekolah, layanan kesehatan harus diikuti dengan proses rehabilitasi kawasan. Pemerintah juga harus serius menertibkan kembali tata ruang dan kawasan agar keseimbangan ekosistem kembali terjaga.

Hutan lindung, tegas dia, tidak boleh lagi menjadi lahan perkebunan yang memicu bencana hidrometeorologi.

"Perusahaan yang terbukti melakukan illegal logging harus ditindak tegas dan wajib melakukan rehabilitasi," tegas politikus PKB ini.

Sementara, anggota Komisi XIII DPR Shadiq Pasadigoe menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyediaan rumah relokasi yang layak di zona merah bagi warga terdampak bencana. Kebutuhan hunian yang aman dan manusiawi merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh tertunda. Utamanya di tengah kondisi pasca bencana yang masih rentan.

"Setiap hari saya menerima banyak keluhan dan harapan masyarakat melalui telepon, WhatsApp dan berbagai jalur komunikasi," ungkap Shadiq dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Para korban bencana, kata Shadiq, butuh kepastian. Hak atas tempat tinggal yang aman tidak boleh ditunda. Negara harus bergerak cepat memastikan Huntara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak digunakan dan aman. ■ TIF